

# UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PENEGAKKAN HUKUM

Brigjen Pol. Bahtiar Ujang Purnama

BERANI  
NJUR!  
HEBAT!

# DATA STATISTIK PENANGANAN TPK oleh KPK (2004 sd 2021)

66% 21%



PENYUAPAN  
**739**



PENGADAAN  
BARANG JASA  
**236**



PENYALAHGUNAAN  
ANGGARAN  
**50**



TPPU  
**38**



PUNGUTAN/  
PEMERASAN  
**26**



PERIZINAN  
**23**



MERINTANGI  
PROSES  
**10**

Gubernur/Walikota/  
Bupati & Wakilnya

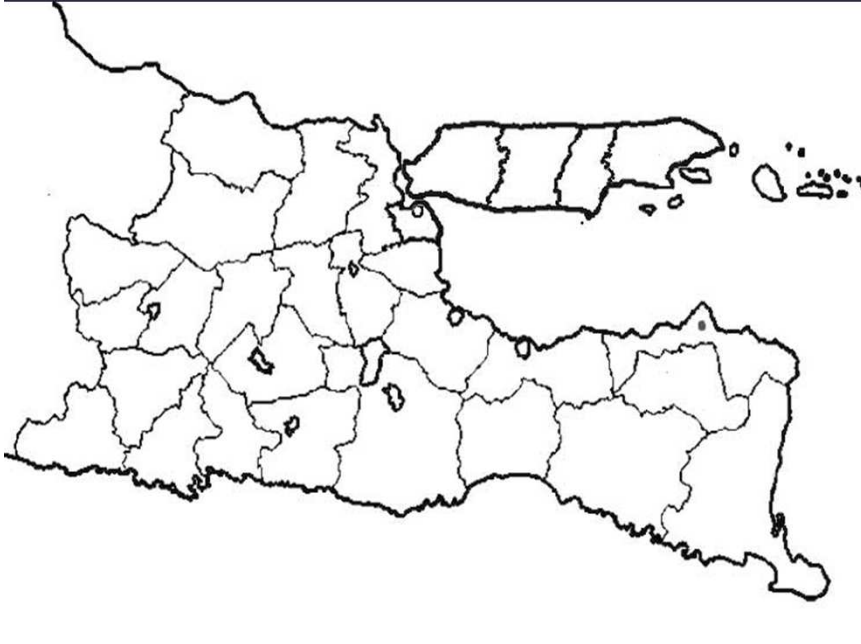
**148**

# TINDAK PIDANA KORUPSI di Jawa Timur

Daftar Kepala Daerah Terjerat Kasus Korupsi Tahun 2014 – 2021



1. Kabupaten Bangkalan
2. Kabupaten Jombang
3. Kabupaten Malang
4. Kabupaten Mojokerto
5. Kabupaten Nganjuk
6. Kabupaten Pamekasan
7. Kabupaten Sidoarjo
8. Kabupaten Tulungagung
9. Kota Batu
10. Kota Blitar
11. Kota Madiun
12. Kota Malang
13. Kota Mojokerto
14. Kota Pasuruan
15. Kabupaten Nganjuk
16. Kabupaten Probolinggo



sumber: [acch.kpk.go.id](http://acch.kpk.go.id)

# FAKTA



- SUAP
- JUALBELI JABATAN



**BUPATI PROBOLINGGO**

**BUPATI SIDOARJO**



**BUPATI NGAJUK**



**BUPATI JOMBANG**



# KORUPSI ADALAH KEJAHATAN LUAR BIASA



## Jenis Tipikor (UU No.31/1999 Jo.UU No.20/2001)

Korupsi dirumuskan dalam 30 jenis tipikor, dikelompokkan menjadi tujuh jenis besar.

1



### KERUGIAN KEUANGAN

#### NEGARA

Ps. 2 , Ps. 3  
(penyalahgunaan wewenang)

2



### SUAP-MENYUAP

Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps, 5(2); Ps 12 a,b;  
Ps 11; Ps 6(1) a,b; Ps 6(2); Ps 12 c,d

3



### PENGGELAPAN DALAM JABATAN

Pasal 8; 9; 10 a,b,c

4



### PEMERASAN

Pasal 12 huruf e,f,g

5



### PERBUATAN CURANG

Ps 7 (1) huruf a,b,c,d; Ps 7 (2); Ps 12 huruf h

6



### KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN

Pasal 12 huruf i

7



### GRATIFIKASI

Pasal 12B jo Pasal 12C



### TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN KORUPSI

- 1.Merintang proses
- 2.Keterangan kekayaan
- 3.Keterangan rekening
- 4.Keterangan palsu
- 5.Identitas pelapor

# MODUS **KORUPSI** KEPALA DAERAH

## Penerimaan Daerah

- 1) Pajak Daerah dan Retribusi
- 2) Pendapatan Daerah dari Pemerintah Pusat
- 3) Kerjasama dengan pihak ketiga

## Benturan Kepentingan

- 1) Pengadaan Barang dan Jasa
- 2) Rotasi, mutasi, promosi
- 3) Rangkap jabatan

## Perizinan

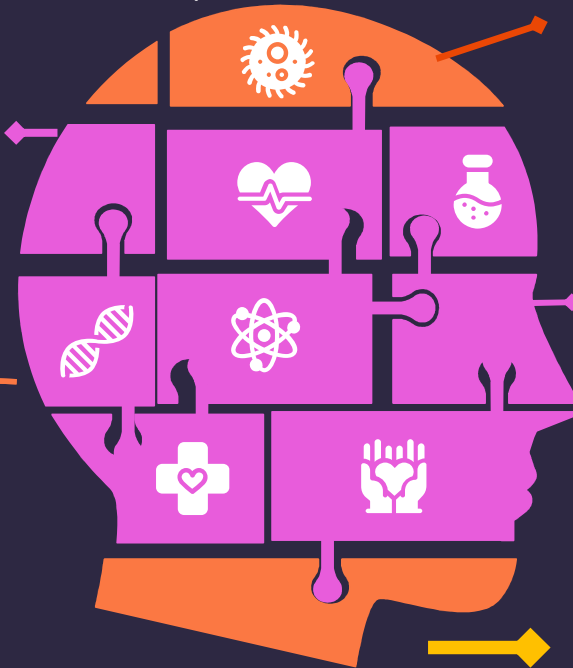
- 1) Rekomendasi,
- 2) Penerbitan Perizinan,
- 3) Pemerasan

## Belanja Daerah

- 1) Pengadaan Barang dan Jasa
- 2) Penempatan dan Pengelolaan Kas Daerah
- 3) Pelaksanaan hibah, bansos, bahkan program
- 4) Penempatan modal pemda di BUMD/Pihak
- 5) Pengelolaan Aset

## Penyalahgunaan wewenang

- 1) Pengangkatan dan Penempatan Jabatan pada orang dekat
- 2) Pemerasan pada rotasi, mutasi, promosi
- 3) Gratifikasi yang dilarang



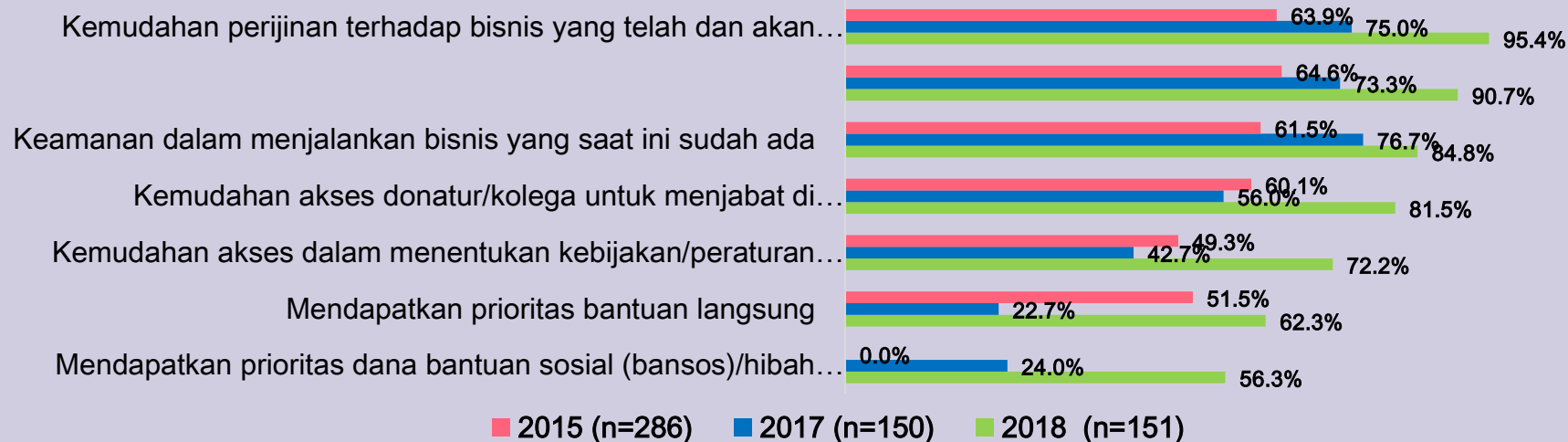


# BIAYA POLITIK

82,3%

Calon kepala daerah/wakil kepala daerah menyatakan adanya donatur dalam pendanaan Pilkada

Sumber : Penelitian Litbang KPK 2017





# KONFLIK KEPENTINGAN

## SUMBER KONFLIK KEPENTINGAN



Hubungan  
Afiliasi



GRATIFIKASI



Kepemilikan Aset



Rangkap  
Jabatan dan  
Moonlighting



Kelemahan  
Sistem  
Organisasi



Kepentingan  
Pribadi





# UU No 19 Tahun 2019

## Pencegahan

Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

## Monitor

Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah

## Koordinasi

Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.

## TUGAS KPK

## Supervisi

Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

## Penindakan

Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

## Eksekusi

Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

# STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI



**PENINDAKAN**  
Takut korupsi – Efek Jera



PENYELIDIKAN,  
PENYIDIKAN,  
PENUNTUTAN,  
EKSEKUSI

**PENCEGAHAN**  
Tidak bisa korupsi – Perbaiki  
Sistem



PENCEGAHAN,  
KOORDINASI SUPERVISI  
DAN MONITORING

**EDUKASI DAN KAMPANYE**  
Tidak ingin korupsi – Membangun nilai



PENDIDIKAN DAN  
PERANSERTA  
MASYARAKAT

**+ Peran Serta Masyarakat**



# ◇ KOORDINASI DAN SUPERVISI

- a. Koordinasi Lid, Dik, Tut;
- b. Sistem laporan pemberantasan TPK;
- c. Meminta informasi pemberantasan TPK;
- d. Pertemuan dengan instansi yg berwenang TPK;
- e. Meminta laporan instansi terkait pencegahan TPK.

Ps. 8

COORDINASI  
(Pasal 6 huruf b)

Tugas KPK  
Ps. 6 UU No. 19/ 2019

SUPERVISI  
(Pasal 6 huruf d)

Ps. 10A

Ps. 10

KPK berwenang melakukan pengambilalihan penyidikan/penuntutan TPK yang sedang dilakukan oleh Kepolisian/Kejaksaan

- a. Pengawasan terhadap instansi;
- b. Penelitian terhadap instansi;
- c. Penelaahan terhadap instansi.

SPDP 2019 – 2021

- Kejaksaan 141 Spdp
- Kepolisian 60 Spdp

Alasan Pengambilalihan:

- a. Laporan masyarakat mengenai TPK tidak ditindaklanjuti;
- b. Penanganan perkara TPK berlarut-larut;
- c. Melindungi pelaku TPK sesungguhnya ;
- d. Penanganan TPK mengandung unsur korupsi ;
- e. Hambatan karena campur tangan eksekutif, yudikatif atau legislatif; atau
- f. Keadaan lain.

# AREA INTERVENSI

## MANAJEMEN ASN

Tujuan  
Mencegah TPK pada  
Manajemen ASN.  
JUAL BELI JABATAN OPD  
Sampai Tingkat Perangkat Desa

## PBJ

Tujuan  
Mencegah TPK pada  
Pengadaan Barang dan  
Jasa (PBJ)

- 34 Indikator
- 70 Sub Indikator

## PERIJINAN

Tujuan  
Mencegah TPK  
pada proses  
perijinan

## PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Tujuan  
Mencegah TPK  
sejak penyusunan  
anggaran

## ASET BMD

Tujuan  
Mencegah  
Penyalahgunaan  
Aset Barang Milik  
Daerah (BMD)

## OPTIMALISASI PAJAK DAERAH

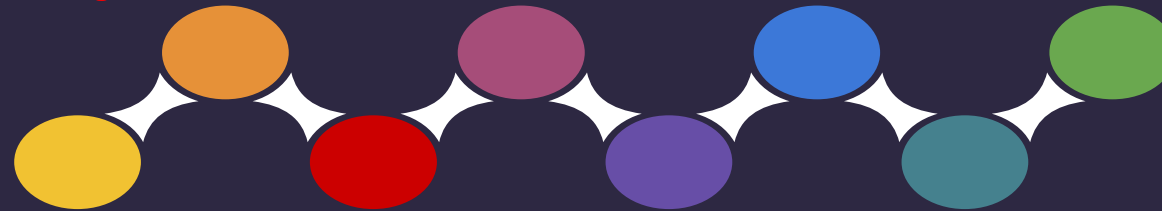
Tujuan  
Mencegah kebocoran  
pajak daerah yang  
disebabkan TPK

## TATA KELOLA DANA DESA

Tujuan Mencegah  
penyalahgunaan DD

## APIP

Tujuan  
Memaksimalkan  
Peran APIP untuk  
Mencegah TPK di  
Pemda



**“SUATU IRONI...DULU BERAWAL DARI PENJARA  
MENJADI PEJABAT DAN PAHLAWAN BANGSA  
TAPI SEKARANG ... BERMULA DARI PARA  
PEJABAT BERAKHIR DIPENJARA MENJADI  
SEORANG KORUPTOR!”**

## “Hadiah harusnya untuk orang susah”

“Ia selalu mengatakan kepada si pemberi hadiah bahwa dirinya tidak perlu diberi hadiah karena ia memiliki gaji. Yang perlu diberi hadiah adalah rakyat yang susah”

— Bpk. Baharudin Lopa





“ I LOOK FOR 3 THINGS  
IN HIRING PEOPLE:  
**INTEGRITY,**  
INTELLIGENCE AND A  
HIGH ENERGY LEVEL.  
BUT IF YOU DON'T  
HAVE THE FIRST, THE  
OTHER TWO WILL KILL  
YOU. WARREN BUFFETT



@agalorda

